

Gambaran Umum PT IIF dan PT PII

Rio Ismail
The Ecological Justice

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF) dan *PT Indonesia Infrastructure Finance* (PT IIF) adalah dua perusahaan publik yang didirikan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas pemerintah untuk pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema *Private Public Partnership* (PPP), yaitu dana penjaminan dan dana pembiayaan. Kehadiran kedua perusahaan ini terkait erat dengan dukungan World Bank melalui *Infrastructure Development Policy Loans* (IDPL-1 Loan P107163), IDPL-2 Loan P111905, IDPL-3 Loan P115102, dan IDPL-4 Loan P118531 dengan total US\$ 850 juta. Kedua perusahaan ini kemudian didirikan dengan dukungan World Bank melalui *Indonesia Infrastructure Guarantee Facility Project/IIGF* (Loan 8192-ID sebesar US\$ 29,6 juta dan *Indonesia Infrastructure Finance Facility/IIFF*) Loan 7713-ID sebesar US\$100 juta.

Belakangan rangkain IDPL dan IIGF/IIF didukung World Bank *First Connectivity Development Policy Loan* (CDPL-1 Loan No. 82090-ID) sebesar US\$ 100 juta dan *Second Connectivity Policy Loan* (CDPL-2 Loan No. 83050-ID) senilai UD\$ 300 juta. CDPL-1 bertujuan antara lain memperkuat kerangka dan reformasi kebijakan nasional yang berfokus pada penguatan koordinasi dan regulasi serta konektivitas antar wilayah¹. Sedangkan CDPL-2 bertujuan antara lain meningkatkan kapasitas Indonesia untuk merespon peluang, daya saing usaha, daya tarik untuk investasi, termasuk peningkatan konektivitas antara pertumbuhan dengan penguatan peraturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan penggunaan sumber daya yang optimal untuk pembangunan berkelanjutan dan perbaikan/pemeliharaan jaringan transportasi².

CDPL 1 dan SDPL 2 juga telah mendukung lahirnya Perpres No. No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional. Peraturan ini antara lain menyebutkan bahwa sistem logistik nasional mengintegrasikan jaringan keuangan (pelaku jasa dan sarana), jaringan transportasi – seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, terminal dan kapal laut, kapal udara, truck, kereta api, dan jaringan pipa – dan jaringan distribusi baik itu penyedia, penyalur maupun prasarana.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada Desember 2009, setelah IDPL III (Loan P115102).
- Mandat utama IIGF adalah memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur di bawah skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau *Public-Private Partnership* (PPP). Berperan sebagai penjamin (*guarantee provider*) kepada sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelalaian serta tindakan atau tiadanya tindakan Pemerintah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian KPS yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Misalnya soal wanprestasi pembayaran, keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan, dan kegagalan.
- Pada 19 November 2012 PT PII mendapatkan pinjaman dari World Bank melalui proyek *Infrastructure Guarantee Fund Project* (P118916) sebesar US\$ 29 juta. Terdiri dari bantuan teknis sebesar US\$ 4.6 juta untuk membantu meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam mempersiapkan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur, termasuk kapasitas PT PII sebagai penyedia kebijakan layanan satu pintu (*single window policy*) dalam melakukan evaluasi, penetapan struktur penjaminan, pemberian penjaminan, dan pemrosesan klaim bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
- Selain itu, PT PII bertanggungjawab membangun kapasitas *Contracting Agencies* (CA), sponsor dan pihak terkait lainnya; mengembangkan dokumen dan prosedur standar; persiapan PPP dan kegiatan pendukung, termasuk studi kelayakan, transaksi dukungan penasehat dan kegiatan lainnya. Sisanya sebesar US\$ 25 juta diberikan sebagai jaminan

tambahan modal yang bisa digunakan PT PII/IIGF untuk memberikan jaminan terhadap proyek-proyek yang dinilai bank memenuhi syarat kebijakan Bank Dunia.

- PT PII yang diarahkan pada peningkatan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari proyek KPS di Indonesia, diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko proyek dimata investor swasta dan kreditor, sehingga menarik lebih banyak investasi swasta dan meningkatkan kompetisi antar penawar potensial dalam proses tender³.
- Pada 19 November 2012 PT PII/IIGF mendapatkan pinjaman dari World Bank melalui proyek *Infrastructure Guarantee Fund Project* (P118916) sebesar US\$ 29 juta⁴. Terdiri dari bantuan teknis sebesar US\$ 4.6 juta untuk membantu meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam mempersiapkan kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private-Partnership/PPP*) dalam pembangunan infrastruktur^{5,6}. Termasuk kapasitas PT PII sebagai penyedia kebijakan layanan satu pintu (*single window policy*) dalam melakukan evaluasi, penetapan struktur penjaminan, pemberian penjaminan, dan pemrosesan klaim bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
- PT PII juga bertanggungjawab meningkatkan tata kelola (*governance*), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya *sudden shock* terhadap APBN dan ring-fencing eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah⁷.

PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IFF)

- PT IIF didirikan oleh pemerintah pada 15 Januari 2010⁸ dengan tujuan menyediakan pembiayaan infrastruktur yang memiliki karakteristik tenor jangka panjang. Pendirian PT IFF didukung dengan pinjaman *Infrastructure Finance Facility* (IIFF) sebesar US\$100 juta (Loan 7713-ID,1999)⁹. Pinjaman World Bank ini memang ditujukan untuk menyiapkan pendirian sebuah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dapat memperkuat ketersediaan sumber pembiayaan yang memiliki karakteristik tenor jangka panjang. Proyek yang akan dibiayai adalah proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial melalui instrumen hutang, penyertaan modal, ataupun penjaminan pembiayaan infrastruktur (*credit enhancement*)¹⁰.
- Proyek ini memiliki dua komponen, yaitu satu komponen adalah pinjaman investasi oleh dari World Bank sebagai utang subordinasi. Sedangkan komponen yang kedua adalah investasi ekuitas dari *International Finance Corporation* (IFC) sebesar US\$ 40 juta¹¹ melalui dana *Infrastructure Financing Facility Project* (2009)¹². Selain itu, proyek ini juga didukung dengan pinjaman dari ADB melalui program *Indonesian Infrastructure Financing Facility Company Project* senilai US\$ 100¹³.
- World Bank bersama IFC dan mitra pembangunan lain yang terlibat dalam proyek ini akan menyetujui panduan operasi yang dibuat oleh IFF sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek tertentu yang akan didukung. Meski demikian, World Bank tidak akan terlibat dalam menyetujui sub-proyek khusus dibawah fasilitas IFF. Namun, pengawasan intensif akan dilakukan oleh World Bank selama masa waktu proyek.
- PT IIF didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)¹⁴ bersama empat lembaga keuangan asing yaitu *Asian Development Bank* (ADB), *International Finance Corporation* (IFC), *Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH* (DEG) dan *Sumitomo Mitsui Banking Corporation* (SMBC). USAID juga ikut memberikan dukungan bantuan pendanaan dalam proses penyusunan rencana kerja dan studi kelayakan PT IIF¹⁵.
- Mayoritas saham sebesar 66,12% dikuasai empat lembaga keuangan asing, IFC sebesar 19,99%¹⁶, ADB Rp 19,99%, DEG 11,24%, dan SMBC 14,90%. MDB's menguasai sekitar 51,2%, sementara pemerintah Indonesia hanya menguasai 33,88%. Tahun lalu IFC juga memberikan komitmen pinjaman proyek sebesar hingga US\$ 250 juta untuk mendukung PT IIF dalam membiayai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia¹⁷//.
- IIF juga menyediakan jasa konsultan (*advisory*) kepada swasta maupun kepada pemerintah. Khusus untuk jasa *advisory* kepada pemerintah, IIF secara signifikan berperan dalam memperkuat skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia, baik dari sisi penyiapan kebijakan maupun dari sisi pengembangan proyek-proyek KPS itu sendiri.

¹ <http://www.worldbank.org/projects/P124006/first-connectivity-development-policy-loan?lang=en>

² <http://www.worldbank.org/projects/P144774?lang=en>

³ Lihat buku Panduan Penjaminan Infrastruktur Edisi 2, Maret 2012

⁴ Lihat Project Agreement antara IBDR dan PT PII/IIGF (Loan Number 8192-ID) pada 19 November 2012.

⁵ <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/09/11/world-class-guarantees-better-infrastructure.print>.

⁶ Lihat Daftar Rencana Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) 2012.

⁷ <http://iigf.co.id/Website/Faq.aspx>

⁸ Siaran Pers Departemen Keuangan Republik Indonesia 26 Januari 2010 - <http://W\iVW.depkeu.go.id> <> e-mail: humas@depkeu.go.id.

⁹ <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/EAP/2015/06/26/090224b082f8e83f/10/Rendered/PDF/Indonesia000InoReport000Sequence009.pdf>

¹⁰ Pada 26 November 2012 World Bank dan pemerintah Indonesia mengamandemen kesepakatan utang Ini, Lihat Letter No. CD-389/IIFX/XI/2012.

¹¹ Project Number. 26443: <http://Ifcext.Ifc.Org/Ifcext/Spiwebsite1.Nsf/o/BDF12B99D05101C7852576BA000E2D3F>.

¹² Lihat Summary of Proposed Investment di <http://Ifcext.Ifc.Org/Ifcext/Spiwebsite1.Nsf/o/BDF12B99D05101C7852576BA000E2D3F>.

¹³ <http://Www.Adb.Org/Sites/Default/Files/Project-Documents/67231/42109-Ino-Rrp.Pdf>.

¹⁴ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

¹⁵ Lihat Siaran Pers Departemen Keuangan No. 18/HMS/2010 26 Januari 2010 di www.depkeu.go.id

Dan juga berita di <http://www.antaraneews.com/berita/171410/pendirian-pt-indonesia-infrastructure-finance>.

¹⁶ Penyertaan modal IFC merupakan bagian dari strategi pinjaman ICF: lihat Summary of Proposed Investment IFC untuk PT Indonesia Infrastructure Finance Facility yang ditandatangani pada June 30, 2009 di

<http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/o/BDF12B99D05101C7852576BA000E2D3F>

¹⁷ Lihat Summary of Investment Information IIF A&B Loan, yang ditandatangani pada June 19, 2014:

<http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcd8a85257a8b0075079d/14363a342535e69e85257cb00534cd1?opendocument>.

GOOGLE TRANSLATE

General description

PT IIF and PT PII

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PII) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) and PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) are two public companies were established by the government to accelerate infrastructure development through the preparation of government facilities for long-term financing for infrastructure projects that Private Public Partnership scheme (PPP), which is the guarantee fund and financing fund. The presence of these two companies is closely related to the support of the World Bank through the Infrastructure Development Policy Loans (IDPL-1 Loan P107163), IDPL-2 Loan P111905, P115102 Loan IDPL 3rd and 4th IDPL Loan P118531 with a total of US \$ 850 million. Both companies are then established with the support of the World Bank through the Indonesia Infrastructure Guarantee Facility Project / IIGF (Loan 8192-ID amounted to US \$ 29.6 million and the Indonesia Infrastructure Finance Facility / IIFF) Loan 7713-ID of US \$ 100 million.

Then, a series of IDPL IDPL and IIGF / IIF supported Connectivity First World Bank Development Policy Loan (CDPL-1 Loan No. 82 090-ID) of US \$ 100 million and Second Connectivity Policy Loan (CDPL-2 Loan No. 83 050-ID) worth of UD \$ 300 million. CDPL-1 aims include strengthening national policy frameworks and reforms focused on strengthening coordination and regulation as well as inter-regional connectivity. While CDPL-2 aims include improving Indonesia's capacity to respond to opportunities, business competitiveness, attractiveness for investment, including increased connectivity between growth and strengthening regulation of land acquisition for public use and the use of optimal resource for sustainable development and repair / maintenance of the network transport.

CDPL SDPL 1 and 2 also have favored the emergence of Presidential Decree No. No. 26 Year 2012 on the National Logistics System Blueprint. This regulation, among others, states that the national logistics system integrates financial network (offender services and facilities), network transportation - such as roads, railways, ports, terminals and ships, aircraft, trucks, trains and pipelines - and The good distribution network providers, dealers and infrastructure.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PII)

-
- Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PII) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) established by the Indonesian government in December 2009, after IDPL III (Loan P115102).
 - IIGF primary mandate is to provide guarantees for infrastructure projects under the Public-Private Partnership scheme (PPP) or Public-Private Partnership (PPP). Act as guarantor (guarantee provider) to the private sector on various infrastructure risks that may arise as a result of negligence as well as government action or lack of action has been agreed in the PPP agreement that can lead to financial losses for investors. For example about payment defaults, late of the necessary permits, licenses, changes in laws and regulations, and failure.
 - On November 19, 2012 PT PII get a loan from the World Bank through the project Guarantee Fund Infrastructure Project (P118916) amounted to US \$ 29 million. Consisting of technical assistance amounting to US \$ 4.6 million to help improve the capacity of government agencies in mempersiapkan kerjasama government and the private sector (PPP) in infrastructure development, including the capacity of PT PII as the provider of the service policy of the door (single window policy) in conducting the evaluation, determination of the structure of the guarantee , provision of guarantees, and claims processing for infrastructure projects in Public Private Partnership scheme (PPP).
 - In addition, PT PII responsible for building the capacity of Contracting Agencies (CA), sponsors and other stakeholders; developing standard documents and procedures; PPP preparation and support activities, including feasibility studies, transaction advisory support and other activities. The remaining amount of US \$ 25 million was given as a guarantee of additional capital that can be used PII / IIGF to provide guarantees to projects that assessed banks eligible World Bank policy.
 - PT PII aimed at improving creditworthiness (creditworthiness) of PPP projects in Indonesia, is expected to reduce the level of project risk in the eyes of private investors and creditors, thus attracting more private investment and increase competition among potential bidders in the tender process.
 - On November 19, 2012 PT PII / IIGF get a loan from the World Bank through the project Guarantee Fund Infrastructure Project (P118916) amounted to US \$ 29 million. Consisting of technical assistance amounting to US \$ 4.6 million to help improve the capacity of government agencies in to help improve the capacity of government agencies in setting up public-private partnerships (Public-Private-Partnership / PPP) in infrastructure development. Including PII capacity as the provider of the service policy of the door (single window policy) in conducting the evaluation, determination of the structure of the guarantee, the provision of underwriting and claims processing for infrastructure projects in Public Private Partnership scheme (PPP).
 - PT PII is also responsible for improving governance (governance), consistency and transparency in the process of underwriting and minimize the possibility of a sudden shock to the state budget and ring-fencing government contingent liability exposures.

PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IFF)

- PT IIF was established by the government on January 15, 2010 with the goal of providing infrastructure funding that has the characteristics of long-term tenor. Establishment PT IFF backed by loans Infrastructure Finance Facility (IIF) of US \$ 100 million (Loan 7713-ID, 1999). World Bank loan is intended to prepare the establishment of an infrastructure financing company that can strengthen the availability of financing sources that have a characteristic long term tenor. The project is to be financed infrastructure projects commercially viable through debt instruments, equity investments, guarantees or infrastructure financing (credit enhancement).
- The project has two components, one component is an investment loan by the World Bank as subordinated debt. While the second component is an equity investment from the International Finance Corporation (IFC) for US \$ 40 million through the fund Infrastructure Project Financing Facility (2009). In addition,

the project is also supported by loans from ADB through the Indonesian Infrastructure Financing Facility Project Company valued at \$ 100.

- World Bank together with IFC and other development partners involved in this project will approve the operating manual prepared by the IFF as a basis for decisions about specific projects that will be supported. Nevertheless, the World Bank will not be involved in approving the special sub-project under the IFF facilities. However, intensive supervision will be carried out by the World Bank during the period of the project.
- PT IIF was established by the government of Indonesia through PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) along with four foreign financial institutions, namely the Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). USAID also provided support funding in the process of the work plans and feasibility studies PT IIF.
- The majority stake of 66.12% controlled by four foreign financial institutions, IFC amounted to 19.99%, ADB Rp 19.99%, 11.24% DEG, and the SMBC 14.90%. MDB's controls around 51.2%, while the Indonesian government controls only 33.88%. Last year IFC also provided project loans commitments amounting to US \$ 250 million to support PT IIF finance infrastructure development plan in Indonesia //.
- IIF also provides consulting services (advisory) to the private and the government. Especially for advisory services to the government, IIF significant role in strengthening the Public Private Partnership scheme (PPP) in Indonesia, both in the preparation of policies and of the development of PPP projects itself.